

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Fokus pada hasil penelitian, temukan dilapangan bahwasannya WALHI sebagai LSM merupakan aktor tidak langsung karena WALHI merupakan aktor yang berada di luar pembuat kebijakan. Peran WALHI terhadap investigasi tambang emas ilegal di Bukik Bulek Kota Padang dilihat menggunakan konsep peran LSM yang diformulasikan Abdi Rahmat dan Adi Suryadi Culla bahwa suatu LSM memiliki peran-peran yang bisa dilakukan di antaranya sebagai *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang), dan *Empowerment* (Pemberdayaan) Dalam temuan lapangan peneliti WALHI hanya memainkan 2 peran dalam kasus investigasi tambang emas ilegal di Bukik Bulek.

Peran yang dilakukan WALHI Sumatera Barat sebagai *Countervailing Power* (Kekuatan Penyeimbang) yakni lobby yang dilakukan dengan menyurati pemerintah melalui Dinas ESDM yang ditujukan ke pemerintah terkait kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) bahwa apakah aktivitas galian di Bukik Bulek memang dikeluarkan izin atau tidak, dan memang izin tambang emas tersebut tidak pernah dikeluarkan. Kemudian aksi bersama masyarakat dengan bentuk investigasi bersama terkait aktivitas yang dilakukan, namun sebelum terciduk pelaku sudah meninggalkan lokasi dan menyisakan alat-alat berat untuk melakukan aktivitas tambang emas. Selain itu juga dengan mengeluarkan *statement* melalui media online maupun cetak, yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengawasi aktivitas galian ilegal yang ada di Kota Padang.

Pada peran *Empowerment* (Pemberdayaan) WALHI Sumatera Barat melakukan beberapa upaya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran akan lingkungan di Kota Padang. Kesadaran atas hak-hak masyarakat yang dijamin undang-undang, partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kemadirian dan keswadayaan dalam bergerak. Pemberdayaan melalui carapengorganisasian masyarakat, temu kampung atau dialog dengan tokoh masyarakat serta *public campaign* di media sosial. Adapun peran lain WALHI dalam temuan peneliti dalam proses framing isu, WALHI Sumbar membangun jaringan kerja dan menjalin kerja sama dengan forum masyarakat Pauh yaitu Forum Anak Nagari Kuranji (FKAN) PAUH IX, serta dengan Kelompok Tani Masyarakat Gunuang Nago.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan dari hasil temuan peneliti dilapangan terkait aktivitas tambang ilegal diduga emas di Bukik Bulek Kota Padang, maka dari itu terdapat beberapa saran-saran dari peneliti yaitu baik secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

6.2.1. Saran Teoritik

1. Kajian tentang politik lingkungan yang berfokus pada aktor tidak langsung dalam persoalan tata kelola kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Kajian mengenai lingkungan hidup memiliki cakupan luas pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana persoalan lingkungan hidup berkaitan dengan politik dan sosial, hal ini terlihat dari bagaimana WALHI Sumatera Barat sebagai aktor tidak langsung yang berpengaruh kepada pengawasan aktivitas galian dan tambang baik yang berizin maupun ilegal, bahwa prinsip pengelolaan sumber

daya alam haruslah berprinsip pada kelestarian lingkungan hidup dan sesuai amanat UU, Hal itu lah yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Baratterhadap aktivitas tambang emas ilegal di Bukik Bulek Pauh Kota Padang yang telah dilakukan dari tahun 2013.

2. Kajian aktor dalam politik lingkungan justru menarik perhatian dalam penelitian ini terlihat bagaimana LSM dan forum forum masyarakat bekerja sama untuk mengawasi aktivitas tambang ilegal ketika pemerintah lemah terhadap pengawasan fenomena tersebut, hal ini berpengaruh kepada demokratisasi tata kelola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

3. Untuk peneliti lanjutan, dalam penelitian ini tidak meneliti lebih lanjut sejauh mana peran peran yang dilakukan oleh LSM berhasil dengan metode dan strategi yang digunakannya terhadap aktivitas tambang ilegal yang terjadi. Hanya sebatas peran peran apa saja yang dilakukan oleh WALHI Sumatera Barat sebagai aktor tidak langsung pada aktivitas tambang emas ilegal di Bukik Bulek Pauh Kota Padang.

6.2.2. Saran Praktis

1. WALHI Sumatera Barat diharapkan meningkatkan secara intensitas peran, aksi atau gerakan dalam kerangka advokasi khususnya terkait aktivitas tambang dan galian ilegal di Sumatera Barat khususnya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena sebagai aktor tidak langsung yang memiliki pengaruh yang besar terhadap tata kelola sumber daya alam, WALHI sebagai pihak yang dianggap memiliki pengetahuan lebih tentang lingkungan hidup bagi masyarakat serta kebutuhan

demikian keseimbangan ekologis dan membantu mengawasi aktivitas aktivitas galian dan tambang ilegal yang terjadi di Sumatera Barat.

2. Penelitian ini sekiranya menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah untuk bagaimana mengambil kebijakan dalam penertiban aktivitas-aktivitas tambang ilegal yang terjadi di sejumlah daerah, agar penyelidikan pelaku pelaku tambang ilegal dapat di temukan, dan meminimalisir aktivitas tambang ilegal yang lainnya yang berdampak pada lingkungan sekitar masyarakat.

3. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi masyarakat bahwasannya masyarakat harus lebih peka terhadap fenomena fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, seperti tambang tambang ilegal yang terjadi yang menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, selanjutnya penelitian ini juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk sama sama memiliki integritas dalam membantu pemerintah untuk penertiban aktivitas aktivitas tambang ilegal yang terjadi di Sumatera Barat melalui tokoh tokoh masyarakat ataupun forum organisasi masyarakat lainnya.



